

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reintegrasi sosial bagi korban NAPZA menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Namun, proses ini seringkali dihadapi dengan berbagai kesulitan yang menghambat kemajuan dan keberhasilannya (Azzahroo et al., 2020). Faktor-faktor seperti stigma masyarakat, keterbatasan keterampilan sosial, gangguan kesehatan mental, kurangnya dukungan sosial, dan masalah pekerjaan serta penghidupan, semuanya menjadi tantangan yang nyata dalam proses reintegrasi sosial (Atikah & Amalia, 2024). Stigma masyarakat terhadap korban NAPZA dapat menjadi penghalang signifikan dalam integrasi sosial mereka (Thamrin et al., 2019).

Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang penyebab dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba (Sukmawati et al., 2023). Perlu disoroti bahwa penyalahgunaan NAPZA sering kali mengakibatkan penurunan keterampilan sosial, yang kemudian menyulitkan korban untuk berinteraksi secara produktif dengan lingkungan sosial mereka (Widianto et al., 2018). Gangguan kesehatan mental juga dapat menjadi faktor penting dalam kesulitan reintegrasi sosial korban NAPZA (Kibtyah, 2015).

Banyak korban NAPZA mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau PTSD (*post-traumatic stress disorder*), yang dapat mempersulit proses reintegrasi sosial mereka (Harahap et al., 2020). Selain itu, kurangnya dukungan sosial yang solid juga menjadi tantangan serius (Atikah & Amalia, 2024). Kurangnya jaringan dukungan sosial yang memadai dapat membuat korban NAPZA merasa terisolasi dan tidak memiliki bantuan yang cukup dalam proses reintegrasi (Fitriana et al., 2021).

Dampak dari kesulitan reintegrasi sosial terhadap kualitas hidup korban napza juga tidak bisa diabaikan. Penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko kembali ke penggunaan narkoba, isolasi dari keluarga dan teman, serta kebingungan dalam kehidupan sosial, semuanya merupakan dampak yang serius yang dapat

menghambat proses reintegrasi sosial (Azzahroo et al., 2020). Oleh karena itu, upaya perbaikan harus difokuskan pada beberapa pendekatan, termasuk terapi dan rehabilitasi, peningkatan keterampilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dukungan kesehatan mental, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba (Fournier et al., 2018). Penysadaran individu telah diusulkan sebagai strategi dalam pembelajaran di komunitas dan dapat mempengaruhi sistem pendidikan (Dawson & Avoseh, 2018; Otaka, 2019).

Pendidikan dalam konteks ini juga berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi integrasi sosial korban narkoba yang membawa pada kesesuaian di lingkungan yang baru serta diimplikasikan yang mendalam dan sebagai praktek pendidikan orang dewasa (McKillican, 2020; Shelby-caffey, 2022). Dikemukakan bahwa korban narkoba memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga untuk menjadi acuan agar tidak kembali melakukan hal negatif kembali (Montoya et al., n.d.). *Project Based Learning* dapat menjadi salah satu strategi pembelajaran dalam meningkatkan kesadaran diri warga belajar (Gelot, 2019), melalui beberapa tahapan universal yang tetap dari perkembangan individu itu sendiri sehingga dapat mengatasi berbagai masalah lingkungan (Net et al., 2022; Roberts, 2022).

Penting untuk sebuah gerakan sosial berjalan berkesinambungan, maka semua peran harus memiliki pemahaman yang sama dan sadar bahwa masalah yang terjadi akibat sistem dan struktur yang bermasalah (Mustopa et al., 2020). Penerapan pendekatan kolaborasi dalam reintegrasi sosial korban NAPZA menawarkan urgensi yang signifikan dalam memperkuat upaya rehabilitasi dan penyembuhan (Sari, 2023). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Selain itu, merujuk pada peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Melibatkan lima sektor utama, yaitu pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media, pendekatan ini

memberikan kerangka kerja holistik yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, program, dan intervensi (Nugroho et al., 2020).

Proses keterlibatan aktif dan kolaboratif dari semua pihak terkait, kolaborasi mampu menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses ke pendidikan, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap korban NAPZA (Gultom et al., 2023). Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan ini, melalui pembentukan kebijakan dan program yang mendukung reintegrasi sosial korban NAPZA, serta penyediaan fasilitas dan layanan pemulihan yang berkualitas, pemerintah dapat memberikan landasan yang kuat bagi upaya reintegrasi (Lestari & Hamid, 2024). Presiden Republik Indonesia dalam hal ini menegaskan bahwa terdapat 17 program yang disebut sebagai Program Prioritas Prabowo-Gibran yaitu salah satunya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Cara yang akan dilakukan oleh pemerintah yang baru salah satunya dengan membangun kesadaran dari tingkat keluarga, karena narkoba menjadi sumber dari kehancuran sebuah produktivitas dan kualitas hidup Masyarakat. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemakaian jarum suntik terbanyak mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608 jiwa, dan sisanya atau berkisar 54.433 jiwa mengkonsumsi narkoba dengan cara non suntik, Di Jawa Barat tepatnya di Kota Bandung terdapat cukup banyak pengguna narkoba jarum suntik (Lakip BNN, 2022). Data menunjukkan bahwa 1,9% dari jumlah siswa SMP di Kota Bandung sudah terpapar narkoba dan sebanyak 1,3% berasal dari siswa SMA. Dari jumlah penduduk kurang lebih 4 juta orang, 10% diantaranya mendapatkan pemulihan sedangkan sisanya mengalami *relapse*, atau kembali lagi menggunakan narkoba (korespondensi karehab BNN Kota Bandung, 2024).

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rata-rata korban NAPZA di PKBM merupakan warga belajar paket C, hal ini dikarenakan banyak warga belajar yang putus sekolah karena terpapar NAPZA. PKBM menerima banyak korban NAPZA karena sekolah formal menstigma bahwa korban NAPZA memberikan dampak buruk bagi teman lainnya, dan tidak diberikan kesempatan

untuk menyelesaikan pendidikannya. Dalam hal ini, PKBM menjadi wadah bagi korban NAPZA untuk menyelesaikan pendidikan, serta menjadikan wadah untuk pemulihan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2023 Pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan untuk warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Salah satu pendidikan nonformal yang dapat ditempuh yaitu melalui PKBM. Selain itu dalam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan dapat diselenggarakan dalam Pendidikan nonformal untuk mengatasi peserta didik yang terkena bencana sosial salah satunya yaitu korban NAPZA.

Dalam konteks ini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran penting sebagai wadah atau jembatan dalam proses reintegrasi sosial korban NAPZA (Wiharjo & Wulandari, 2024). PKBM bukan hanya sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan kedua bagi warga belajar yang putus sekolah, melainkan juga sebagai ruang aman untuk pemulihan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas diri (Rahmayanti et al., 2023). Keunikan PKBM terletak pada fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan warga belajar, termasuk mereka yang mengalami kerentanan sosial seperti korban penyalahgunaan narkoba.

Salah satu contoh nyata dari peran strategis PKBM dalam proses ini adalah PKBM Residivist di Kota Bandung. Lembaga ini didirikan secara khusus untuk menangani pendidikan dan pemulihan bagi korban NAPZA dan mantan narapidana (residivis). PKBM Residivist telah menjadi pelopor dalam menyelenggarakan program-program pendidikan berbasis kebutuhan warga belajar, pelatihan keterampilan, bimbingan mental dan spiritual, serta dukungan psikososial yang terintegrasi. Dengan menjalin kolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Pendidikan, psikolog, serta komunitas-komunitas, PKBM Residivist berhasil menjadi model dalam menciptakan

lingkungan pembelajaran yang inklusif dan suportif bagi korban NAPZA yang ingin kembali membangun hidup mereka.

Pendekatan yang digunakan PKBM Residivist menekankan pada prinsip pemulihan berbasis komunitas, di mana korban NAPZA tidak hanya menjadi objek dari program pemulihan, tetapi juga dilibatkan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui pendekatan partisipatif ini, korban NAPZA dapat merasakan kepemilikan atas proses reintegrasi yang dijalaninya. Tidak hanya itu, PKBM Residivist juga menyediakan pelatihan kerja, pendampingan usaha, serta koneksi dengan dunia industri untuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM mampu menjalankan fungsi pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan secara simultan, menjadikannya sebagai elemen penting dalam strategi reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

PKBM dapat dilihat sebagai aktor pendidikan komunitas yang bukan hanya berfokus pada pengembangan kognitif, tetapi juga pada transformasi sosial dan personal warga belajarnya. Peran PKBM, seperti yang dilakukan oleh PKBM Residivist, memberikan harapan baru bagi korban NAPZA untuk memperoleh pendidikan, pemulihan, dan kemandirian, sekaligus mengurangi beban sosial akibat dampak narkoba dalam masyarakat.

Konteks penelitian ini, istilah residivis dalam PKBM Residivist merujuk secara khusus pada korban penyalahgunaan NAPZA yang telah melalui fase rehabilitasi dan berusaha kembali ke masyarakat. Mereka bukanlah pelaku kriminal karena tindakan kekerasan atau kejahatan lainnya, melainkan pengguna NAPZA yang sebelumnya mengalami ketergantungan dan kemudian menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial melalui lembaga resmi seperti BNN, rumah sakit, atau pusat rehabilitasi swasta. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan status sosial yang melekat pada individu yang berulang kali mengalami keterjeratan dalam siklus kecanduan, bukan karena niat kriminalitas, melainkan karena kompleksitas pemulihan yang panjang dan penuh tantangan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan dukungan sosial dan akses korban NAPZA ke layanan pemulihan

yang tepat di Jawa Barat khususnya Kota Bandung. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan bahwa reintegrasi sosial korban NAPZA sebagai proses di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Bandung dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. PKBM dapat menjadi solusi alternatif dalam mempertahankan proses reintegrasi sosial agar tidak terputus, karena di dalamnya tercantum tujuan untuk memberdayakan masyarakat (Rahman et al., 2024).

Kolaborasi yang dilaksanakan melalui PKBM merupakan bentuk upaya pengembangan aktivitas bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan holistiknya (Mokodongan, Yuniati & Sarbini, 2023). Kolaborasi yang dilaksanakan merupakan bentuk solusi yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah serta masyarakat dengan adanya perjanjian bersama untuk saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya untuk memberikan reintegrasi sosial pada korban narkoba (Saleh, 2020). Dalam pelaksanaannya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat melibatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan yang dapat disetujui dan dipertanggung jawabkan secara bersama.

Penelitian tentang upaya penyadaran berbasis kolaborasi dalam menguatkan reintegrasi sosial bagi korban narkoba di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki alasan yang mendalam. PKBM sering berperan sebagai pusat pembelajaran dan dukungan komunitas yang sangat terkait dengan masyarakat sekitarnya, sehingga melibatkan PKBM dalam upaya reintegrasi sosial korban narkoba dapat memanfaatkan struktur dan jaringan yang sudah ada di tingkat masyarakat. Penggunaan pendekatan kolaborasi, yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media, akan memberikan solusi yang holistik untuk mengatasi tantangan reintegrasi sosial. Hal ini mencakup dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan, edukasi masyarakat, serta pembentukan persepsi positif melalui media. Tanpa dilakukannya penelitian ini, dampaknya mungkin akan melibatkan kegagalan atau kurangnya efektivitas dalam program reintegrasi sosial, yang dapat menyebabkan lebih banyak korban narkoba terpinggirkan, mengalami stigmatisasi, atau kembali ke dalam lingkaran kecanduan tanpa mendapatkan dukungan yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

potensi untuk memberikan pandangan yang lebih terinci dan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan reintegrasi sosial korban narkoba melalui keterlibatan PKBM dan penerapan pendekatan kolaborasi.

Berdasarkan fakta dan berbagai rujukan yang telah digambarkan di atas, maka perlu adanya kajian mengenai bagaimana upaya pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) resdivist dalam reintegrasi sosial korban NAPZA. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tantangan dan pendekatan dalam proses reintegrasi sosial korban NAPZA, studi yang khusus membahas peran PKBM dalam konteks ini masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek-aspek tertentu seperti stigma masyarakat, gangguan kesehatan mental, dan kurangnya dukungan sosial secara terpisah (Adikpo & Ugondo, 2019; Graça & Oliveira, 2019; Steenbergen, 2021; Zbinden, 2019). Namun, belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan semua faktor tersebut dalam sebuah model kolaborasi holistik yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan pihak lainnya. Kajian ini menawarkan kontribusi baru dengan memusatkan perhatian pada peran strategis PKBM sebagai pusat pembelajaran dan dukungan komunitas dalam reintegrasi sosial korban NAPZA. Pendekatan ini tidak hanya akan mengeksplorasi pelaksanaan program-program yang ada, tetapi juga menggali potensi kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan Reintegrasi Sosial Korban Napza Pada PKBM yaitu:

- 1) Tahap penyaluran merupakan tahapan terakhir dalam reintegrasi sosial korban narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya tahapan ini menjadi gagal. Hal tersebut karena kesadaran korban narkoba masih belum terbangun dengan baik di dalam dirinya untuk tidak kembali lagi kepada perilaku negatif atau menyimpang di masyarakat seperti berperilaku buruk kepada pimpinan atau masyarakat lainnya, berkata kasar, hingga kembali menggunakan narkoba.

- 2) Masalah yang mendesak dalam konteks urgensi penerapan pendekatan kolaborasi dalam reintegrasi sosial bagi korban narkoba adalah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh mereka yang mengalami penyalahgunaan narkoba. Reintegrasi sosial memerlukan upaya serius untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dukungan masyarakat. Tantangan tersebut melibatkan stigma sosial terhadap korban narkoba, keterbatasan akses ke lapangan pekerjaan yang layak, dan kurangnya dukungan sistematis dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor industri, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media. Tanpa keterlibatan dan koordinasi erat antara semua unsur kolaborasi, upaya reintegrasi sosial ini mungkin tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Urgensinya terletak pada perlunya pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dan memfasilitasi korban narkoba dalam membangun kembali kehidupan sosial mereka. Jika pendekatan ini tidak diterapkan secara serius, risiko tinggi terhadap kekambuhan penyalahgunaan zat, isolasi sosial, dan ketidakstabilan mental dapat terus menghambat proses reintegrasi sosial, dengan dampak negatif yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Penggunaan Narkoba menjadi epidemi yang dapat merusak rencana keberlanjutan dunia. Masalah ini tidak hanya menciptakan dampak negatif pada kesehatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi secara luas. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan pada produktivitas pekerja, memperburuk kesejahteraan keluarga, dan menyebabkan konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan sosial. Selain itu, adanya perdagangan narkoba yang terorganisir secara internasional memperparah dampak global, menciptakan lingkungan yang tidak stabil. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap epidemi narkoba diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap rencana keberlanjutan dunia dan untuk mendukung proses regenerasi yang positif di tingkat masyarakat secara global.

- 4) Masalah peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021 menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Peningkatan ini lebih mencemaskan karena terutama terjadi di kalangan kelompok usia 15-24 tahun, yang merupakan kelompok rentan dan masa pembentukan karakter. Angka yang meningkat di kalangan remaja dan dewasa muda tidak hanya mencerminkan risiko kesehatan individu, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang pada stabilitas sosial dan ekonomi.
- 5) Presiden dalam hal ini menegaskan bahwa terdapat 17 program prioritas yaitu salah satunya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Cara yang akan dilakukan oleh pemerintah yang baru salah satunya dengan membangun kesadaran dari tingkat keluarga, karena narkoba menjadi sumber dari kehancuran sebuah produktivitas dan kualitas hidup Masyarakat. Data menunjukkan bahwa 1,9% dari jumlah siswa SMP di Kota Bandung sudah terpapar narkoba dan sebanyak 1,3% berasal dari siswa SMA. Dari jumlah penduduk kurang lebih 4 juta orang, 10% diantaranya mendapatkan pemulihan sedangkan sisanya mengalami *relapse*, atau kembali lagi menggunakan narkoba (korespondensi karehab BNN Kota Bandung, 2024). Saat ini, banyak korban NAPZA yang terlibat dalam PKBM menunjukkan aktivitas beragam dalam upaya pemulihan mereka, seperti mengikuti program pendidikan paket C, berpartisipasi dalam kegiatan keterampilan kerja, dan mendapatkan konseling psikososial secara rutin. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, stigma negatif, serta kesulitan dalam mengintegrasikan kembali ke dalam lingkungan sosial dan profesional mereka. Oleh karena itu, pendampingan intensif dan terstruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberhasilan proses reintegrasi sosial korban NAPZA di Kota Bandung.
- 6) Masalah yang muncul adalah pentingnya penyadaran individu sebagai strategi dalam pembelajaran di komunitas telah diusulkan, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun penyadaran individu dianggap sebagai tahap awal yang kritis dalam upaya pencegahan dan

intervensi terhadap penyalahgunaan narkoba, belum ada pemahaman yang memadai mengenai bagaimana menyelaraskan strategi ini dengan sistem pendidikan dan komunitas secara menyeluruh. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dapat menghambat efektivitas program penyadaran, sehingga mungkin sulit untuk mencapai dampak yang signifikan pada tingkat komunitas. Oleh karena itu, perlu ada penelitian dan implementasi strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyadaran individu bukan hanya sebagai tahap awal, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pendidikan dan komunitas secara menyeluruh.

Merujuk pada identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Napza Pada PKBM diantaranya yaitu:

- 1) Bagaimana kondisi reintegrasi sosial korban NAPZA di PKBM Residivist?
- 2) Bagaimana upaya reintegrasi sosial korban NAPZA?
- 3) Bagaimana kolaborasi dalam pemulihan reintegrasi sosial korban NAPZA?
- 4) Apa faktor determinatif dari pendampingan reintegrasi sosial korban NAPZA oleh PKBM Residivist?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dengan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Napza Pada PKBM ini yaitu :

- 1) Menganalisis kondisi reintegrasi sosial korban NAPZA di PKBM Residivist
- 2) Menganalisis upaya reintegrasi sosial korban NAPZA
- 3) Menganalisis kolaborasi dalam pemulihan reintegrasi sosial korban NAPZA
- 4) Menganalisis faktor determinatif dari pendampingan reintegrasi sosial korban NAPZA oleh PKBM Residivist

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian dengan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Napza Pada PKBM ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan dan kajian pengembangan ilmu Pendidikan Masyarakat mengenai upaya pusat kegiatan belajar masyarakat resdivist dalam mendampingi reintegrasi sosial korban napza.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana upaya pusat kegiatan belajar masyarakat resdivist dalam mendampingi reintegrasi sosial korban napza.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan masyarakat tentang upaya pusat kegiatan belajar masyarakat resdivist dalam mendampingi reintegrasi sosial korban napza.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat mengembangkan pembelajaran dalam reintegrasi sosial untuk mengurangi sikap diskriminatif di dalam masyarakat.

1.5 Struktur organisasi disertasi

Secara keseluruhan sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Berisikan penjelasan dari uraian latar belakang permasalahan dengan dukungan fakta masalah dan data sekunder tentang urgensi pengembangan model penyadaran, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan penjelasan dari tinjauan literatur dari penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sama beserta kerangka teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian

- BAB III : Berisikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan beserta alasan pemilihan metode tersebut serta membahas lokus dan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi data teknik pengolahan data serta teknik analisis data.
- BAB IV : Berisikan gambaran tentang objek penelitian, penjelasan temuan penelitian
- BAB V : Berisikan analisis hasil penelitian dengan menggunakan data dan informasi yang akurat serta merujuk pada teori
- BAB VI : Berisikan simpulan dari analisis hasil penelitian serta pengajuan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan alternatif kebijakan kedepannya.